

# **ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, KEMISKINAN, DAN PENGANGGURAN**

**Kusuma Wijaya**

**kusumawijaya785@gmail.com**

**Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh fiskal desentralisasi pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, kemiskinan dan pengangguran di kabupaten / kota di Kalimantan. Ukuran desentralisasi fiskal digunakan dalam penelitian ini adalah rasio independensi, derajat fiskal desentralisasi dan rasio ketergantungan. Sementara itu, gross regional produk dalam negeri sesuai dengan bidang usaha sebagai proxy untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial diukur oleh komponen HDI, tingkat kemiskinan absolut sebagai proksi untuk pengurangan kemiskinan, dan pengangguran sebagai proxy ke tingkat pengangguran terbuka. Data dianalisis oleh WarpPLS. Sedangkan data yang digunakan adalah time series dan data cross sectional antara kabupaten / kota selama 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal sudah dampak positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Namun, dampak signifikan positif pada kesejahteraan sosial, dan desentralisasi fiskal berpengaruh negatif signifikan berdampak pada kemiskinan. Sementara pertumbuhan ekonomi positif dampak signifikan terhadap kesejahteraan, positif tidak signifikan berdampak pada kemiskinan dan dampak signifikan positif tentang pengangguran.

**Kata kunci:** desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, kemiskinan, pengangguran

## **ABSTRACT**

His study aims to understand the effect of fiscal decentralization on economic growth, social welfare, poverty and unemployment in districts / cities in Kalimantan. The measure of fiscal decentralization used in this study is the independence ratio, decentralized fiscal degree and dependency ratio. Meanwhile, gross domestic product in line with the business sector as a proxy for economic growth, social welfare is measured by the HDI component, absolute poverty rate as a proxy for poverty reduction, and unemployment as a proxy to the open unemployment rate. Data is analyzed by WarpPLS. While the data used are time series and cross sectional data between districts / cities for 5 years. The results showed that fiscal decentralization had no significant positive impact on economic growth, however, a significant positive impact on social welfare, and fiscal decentralization had a significant negative effect on poverty. While positive economic growth a significant impact on welfare, a positive insignificant impact on poverty and significant positive impacts about unemployment.

**Keywords:** fiscal decentralization, economic growth, social welfare, poverty, unemployment

## **PENDAHULUAN**

Pada tahun 2001 Indonesia telah memasuki era baru dalam tata pemerintahan, yaitu pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya kondisi tersebut maka pada saat itulah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mulai diberlakukan. Pelaksanaan otonomi daerah dalam kedua UU tersebut pada dasarnya merupakan tanggapan terhadap aspirasi adanya keinginan format baru mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia yang berimplikasi pada pelimpahan kewenangan dalam berbagai bidang. Sejalan dengan pembagian kewenangan tersebut maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dibebankan melalui APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan. Disamping itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi maka Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil pendapatan (revenue sharing) serta transfer keuangan (grant) atau sering disebut dana perimbangan.

Desentralisasi pada dasarnya tidak mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai dimensi yang beragam, khususnya menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan serta pembangunan sosial ekonomi. Secara umum, desentralisasi terdiri dari desentralisasi politik (political decentralization), desentralisasi administratif (administrative decentralization), desentralisasi ekonomi (economic of market decentralization) dan desentralisasi fiskal (fiscal decentralization) (Kälin, 2001). Perdebatan yang mengemuka di kalangan para praktisi ekonomi

berkaitan dengan desentralisasi fiskal telah berlangsung cukup lama. Isu utama yang menarik untuk senantiasa didiskusikan adalah mengenai keterkaitan antara desentralisasi fiskal dengan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, yakni pertumbuhan ekonomi. Terdapat ambiguitas mengenai hubungan antara dua variabel tersebut yakni apakah pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari desentralisasi fiskal atau justru sebaliknya.

## **MATERI DAN METODE PENELITIAN**

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kemedekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan daerah. Menurut Saragih (2003), UU tersebut telah ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Wewenang daerah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom sudah diatur secara tegas, disebutkan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja. Sebelum era baru desentralisasi fiskal digulirkan pada tahun 2001, setiap daerah tingkat I dan tingkat II memiliki dua jenis pendapatan guna membiayai pengeluaran mereka yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat (Alfirman,

2003:7). Krisis politik dan ekonomi telah memicu pemerintah daerah untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur urusan daerahnya masing-masing (Forrester and May, 1999).

Fitrani et al. (2005) mengungkapkan bahwa menyusul lengsernya Presiden Soeharto, terdapat tekanan untuk mereformasi setiap kebijakan yang bernuansa korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu contoh kebijakan yang dimaksud adalah beberapa daerah yang mempunyai sumber daya alam berlimpah namun memperoleh bagi hasil pendapatan yang tidak fair dari pemerintah pusat (Tadjoeddin et al, 2001). Untuk itu, Presiden Habibie yang meneruskan estafet kepemimpinan bangsa, berinisiatif melakukan reformasi kebijakan menuju era desentralisasi dan demokratisasi (Fitrani et al, 2005:60). Indikator yang digunakan sebagai pengukur adalah rasio pendapatan daerah terhadap APBD dan rasio pengeluaran daerah terhadap APBD. Indikator ini digunakan juga oleh peneliti sebelumnya seperti Zhang and Zou (1998), Philips and Woller (1997), Vazquez and McNab (2001) dan lainnya. Dari variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan dasar teoritis yang ada maka penulis menyimpulkan bahwa indikator desentralisasi fiskal dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi pendapatan dan sisi pengeluaran.

Pada sisi pendapatan, daerah dapat melakukan dua hal: Pertama, mengelola sumber pendapatan konvensional berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta optimalisasi pinjaman daerah dan laba BUMD. Kedua, dapat mengoptimalkan sumber pendapatan baru yaitu pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Sedangkan di sisi pengeluaran indikator yang digunakan adalah pengeluaran daerah. Berdasar penelitian Due dan Miftah (2000), perbandingan antara pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah terhadap pendapatan bruto cenderung berbanding linear dan positif, yang berarti jika pengeluaran pemerintah daerah

naik maka pendapatan bruto juga akan ikut naik bersamaan dengan pembangunan ekonomi suatu daerah dan juga beberapa penelitian mengenai hubungan pendapatan daerah didapat bahwa variabel pengeluaran pemerintah daerah memberikan pengaruh positif. Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 1994). Secara lebih rinci pengeluaran pemerintah digunakan untuk membayar gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan masyarakat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis infrastruktur dalam proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi menurut Ginting dan Rasbin (2010) menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil.

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah dapat diukur dengan cara membandingkan PDRB tahun yang sedang berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Menurut Undang-Undang ---No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut UU tersebut dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat dihubungkan dengan pendapatan yang akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas

miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makan dan bukan makan (BPS, 194). Untuk kebutuhan minum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedang pengeluaran kebutuhan minuman bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Sharp, et.al (1996: 173-191) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.

Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Menurut BPS, pengangguran adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang digolongkan sebagai penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Beberapa studi menyoroti pengalaman negaranegara tertentu dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Bird dan Vaillancourt, 2000).

Namun, harus diakui juga bahwa dasar teoritis yang menjelaskan kedua hubungan

tersebut saat ini sedang dikembangkan dan banyak menjadi perdebatan di antara para ahli dalam berbagai literatur teoritik dan empirik. Di Indonesia, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi telah dijelaskan oleh beberapa penelitian. Brodjonegoro (2006), misalnya, menegaskan bahwa dalam lima tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskal, sulit untuk disimpulkan apakah desentralisasi berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya adalah, selama periode tersebut, terjadi pemulihan ekonomi yang kemungkinan besar disebabkan oleh stabilitas makroekonomi nasional. Indikasi lain yang terlihat cukup jelas adalah bahwa kawasan Indonesia Bagian Barat (IBB) tumbuh lebih cepat disbanding Indonesia Bagian Timur (IBT), meski perekonomian Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan tercepat. Juga ada indikasi kesenjangan fiskal antar daerah memasuki dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan cepat dan akan menetes pada kesejahteraan (pembangunan manusia). Berbeda dengan hipotesis "trickle down effect", Barro (1991) menemukan hubungan sebab akibat antara tingkat kematian bayi dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang juga sejalan dengan teori "human capital". Dengan menyusun hubungan tersebut, Barro (1991) menolak hipotesis "trickle down effect" yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) hanya dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat. Berdasar telaah hasil penelitian tersebut, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: H4: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Kalimantan.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan harus

mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompokkelompok sosial yang ada didalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2003:21). Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Pertambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Adapun kemampuan itu sendiri lebih lanjut di pengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Sedangkan penelitian Hamzah (2008), Prastyo (2010), Katili (2011), dan Annisa (2011), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penelitian yang menunjukkan hasil positif pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran ditunjukkan oleh Hamzah (2008).

Sedangkan penelitian Katili (2011) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Penelitian Maiputra (2011) dan Annisa (2011) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran. Berdasar telaah hasil penelitian tersebut, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: H5: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/ Kota Kalimantan. H6: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten/ Kota Kalimantan.

Menurut Indriyanto dan Supomo (1999) populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sementara itu, menurut Sugiyono (2014) populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasar pada pengertian tersebut jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota se Pulau Kalimantan. Sejak tahun 2004–2014 tercatat ada 5 provinsi di Kalimantan dengan Jumlah 56 kabupaten/kota. Ada provinsi yang baru diresmikan pada tahun 2012 yaitu provinsi Kalimantan Utara. Sampel didefinisikan sebagai bagian atau subset dari populasi yang terdiri dari anggotaanggota populasi yang terpilih, 56 kabupaten/kota yang menjadi sampel. Pemilihan sampel ini dilakukan dengan purposive sampling. Definisi operasional setiap variabel yang berhubungan dengan hipotesis adalah sebagai berikut: Dalam penelitian ini, indikator desentralisasi fiskal sebagai inspirasi dari ukuran/indikator yang dikembangkan oleh Akai dan Sakata (2002). Pertama, indikator pendapatan yang terdiri dari pendapatan daerah kotor/ gross local revenue dan pendapatan daerah netto/net localrevenue. Rasio pendapatan daerah kotor merupakan persentase total pendapatan asli pemerintah daerah terhadap total pendapatan pemerintah pusat. Rasio ini serupa dengan indikator yang disusun oleh Woller dan

Phillips (1998). Rasio ini selanjutnya disebut indikator pertama (IP-1). Sementara itu, pendapatan daerah netto didefinisikan sebagai persentase pendapatan pemerintah daerah terhadap pendapatan pemerintah pusat, namun tidak memperhitungkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan yang bersifat grants. Dengan demikian, dalam pendapatan daerah netto, tidak memperhitungkan DAU dan DAK dalam total pendapatan daerah. Rasio ini selanjutnya disebut indikaor kedua (IP-2). Pengukuran

tersebut diadopsi dari Akai dan Sakata (2002). Kedua, indikator pengeluaran yang terdiri atas pengeluaran tingkat kabupaten/kota atau local expenditure dan pengeluaran tingkat propinsi/provincial spending. Indikator ekonomi yang ketiga dikembangkan oleh Wibowo (2008) yaitu, rasio total Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pengeluaran masing-masing daerah. Rasio ini selanjutnya disebut indikator ketiga (IP-3). Indikator ini mengukur tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintahnya. Rasio pengeluaran tingkat kabupaten/ kota menghitung porsi pengeluaran/expenditure share Pemda, dimana rasio ini dihitung dengan membagi total pengeluaran APBD seluruh kabupaten/ kota dalam satu propinsi dengan total pengeluaran APBD seluruhnya, yakni APBD kabupaten/kota dan APBD propinsi yang bersangkutan. Rasio ini selanjutnya disebut indikator keempat (IP-4).

Indikator tersebut merupakan pengembangan dari rasio yang diusulkan oleh Akai dan Sakata (2002) dan indikator yang diadopsi dari Zhang dan Zou (1998). Apabila pertumbuhan ekonomi daerah bervariasi dengan adanya perbedaan level desentralisasi fiskal, maka hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah mampu memacu pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi yakni perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun menurut harga konstan (PDRB riil) per kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi dirumuskan: Tingkat layak hidup masyarakat yang diindikasikan oleh kondisi ekonomi dan keadaan sosial masyarakat. Dalam studi ini variabel kesejahteraan masyarakat diproksi dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (basic needs) dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis

Kemiskinan. Cara pengukuran tingkat kemiskinan dari BPS adalah dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi, cara ini lazim disebut dengan Headcount Index. Angka pengangguran menurut (Sumarsono, 2009) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan tetapi tidak sedang mempunyai pekerjaan disebut pengangguran. Secara sederhana tingkat pengangguran dapat dirumuskan sebagai berikut:  $\text{Tingkat pengangguran} = \frac{X}{100\%}$ . Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS) atau disebut juga persamaan struktural (SEM). Menurut Jogiyanto (2011) PLS adalah salah satu metode statistik SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang (missing value), dan multikolinearitas. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi model dan menganalisa data atau hubungan antar variabel independen dan variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN

Analisis data pada penelitian ini menggunakan hasil statistik deskriptif dan analisis partial least square (PLS). Hasil pengujian analisis statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 tampak bahwa indikator IP-1 (kemandirian) memiliki tingkat rata-rata kemandirian sebesar 0,072 untuk seluruh kabupaten/kota di Kalimantan. Tingkat kemandirian terendah ditunjukkan di Kabupaten Pulang Pisang pada tahun 2010 sebesar 0,019 dan kemandirian tertinggi sebesar 0,43 atau 43% terdapat di Kota Balikpapan pada tahun 2014.

Ukuran kemandirian menegaskan bahwa rata-rata tingkat kemandirian kabupaten/kota di Kalimantan sangat kurang. Struktur APBD setiap kabupaten/kota, dilihat Phillips (1998). Rasio ini selanjutnya disebut indikator pertama (IP-1). Sementara itu,

pendapatan daerah netto didefinisikan sebagai persentase pendapatan pemerintah daerah terhadap pendapatan pemerintah pusat, namun tidak memperhitungkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan yang bersifat grants. Dengan demikian, dalam pendapatan daerah netto, tidak memperhitungkan DAU dan DAK dalam total pendapatan daerah. Rasio ini selanjutnya disebut indikator kedua (IP-2). Pengukuran tersebut diadopsi dari Akai dan Sakata (2002). Kedua, indikator pengeluaran yang terdiri atas pengeluaran tingkat kabupaten/kota atau local expenditure dan pengeluaran tingkat propinsi/provincial spending. Indikator ekonomi yang ketiga dikembangkan oleh wibowo (2008) yaitu, rasio total Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pengeluaran masing-masing daerah. Rasio ini selanjutnya disebut indikator ketiga (IP-3). Indikator ini mengukur tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintahnya. Rasio pengeluaran tingkat kabupaten/ kota menghitung porsi pengeluaran/expenditure share Pemda, dimana rasio ini dihitung dengan membagi total pengeluaran APBD seluruh kabupaten/ kota dalam satu propinsi dengan total pengeluaran APBD seluruhnya, yakni APBD kabupaten/kota dan APBD propinsi yang bersangkutan. Rasio ini selanjutnya disebut indikator keempat (IP-4).

Indikator tersebut merupakan pengembangan dari rasio yang diusulkan oleh Akai dan Sakata (2002) dan indikator yang diadopsi dari Zhang dan Zou (1998). Apabila pertumbuhan ekonomi daerah bervariasi dengan adanya perbedaan level desentralisasi fiskal, maka hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah mampu memacu pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi yakni perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun menurut harga konstan (PDRB riil) per kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi dirumuskan: Tingkat layak hidup masyarakat yang diindikasikan oleh kondisi ekonomi dan keadaan sosial masyarakat. Dalam studi ini

variabel kesejahteraan masyarakat diproksi dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (basic needs) dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Cara pengukuran tingkat kemiskinan dari BPS adalah dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi, cara ini lazim disebut dengan Headcount Index Angka pengangguran menurut (Sumarsono,2009) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan tetapi tidak sedang mempunyai pekerjaan disebut pengangguran. Secara sederhana tingkat pengangguran dapat dirumuskan sebagai berikut:  $Tingkat\ pengangguran = \frac{X}{100\%}$  Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS) atau disebut juga persamaan struktural (SEM). Menurut Jogiyanto (2011) PLS adalah salah satu metode statistik SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang (missing value), dan multikolinearitas. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi model dan menganalisa data atau hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. HASIL PENELITIAN Analisis data pada penelitian ini menggunakan hasil statistik deskriptif dan analisis partial least square (PLS). Hasil pengujian analisis statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1  
Analisis Data dengan Statistik Deskriptif

	<i>Minimum</i>	<i>Mean</i>	<i>Maximum</i>
Ip-1	0,019	0,072	0,43
Ip-2	0,017	0,017	0,30
Ip-3	0,001	0,065	0,36
Ip-4	0,015	0,078	0,68
Pertumbuhan Ekonomi	2,92	6,74	19,29
Kesejahteraan Masyarakat	68,32	58,50	78,85
Kemiskinan	2,84	7,34	15,31
Pengangguran	0,31	4,868	14,32

Sumber: Output (olah data).

Berdasar Tabel 1 tampak bahwa indikator IP-1 (kemandirian) memiliki tingkat rata-rata kemandirian sebesar 0,072 untuk seluruh kabupaten kota di Kalimantan. Tingkat kemandirian terendah ditunjukkan di Kabupaten Pulang Pisang pada tahun 2010 sebesar 0,019 dan kemandirian tertinggi sebesar 0,43 atau 43% terdapat di Kota Balikpapan pada tahun 2014. Ukuran kemandirian menegaskan bahwa rata-rata tingkat kemandirian kabupaten/kota di Kalimantan sangat kurang. Struktur APBD setiap kabupaten/kota, dilihat dari sisi penerimaan yang paling dominan adalah dana perimbangan. Proporsi dana perimbangan terhadap realisasi total penerimaan daerah sangat tinggi. Tingginya proporsi dana tersebut mengurangi tingkat kemandirian daerah.

Diketahui bahwa trend rata-rata derajat desentralisasi fiskal cenderung meningkat namun masih sangat kurang. Hal ini sangat wajar karena jika dilihat dari masing-masing proporsi, PAD lebih kecil dibandingkan dengan proporsi dana perimbangan.

Di satu sisi, derajat desentralisasi fiskal tersebut menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan belum mampu melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pertumbuhan PAD digunakan untuk mengetahui apakah setiap kabupaten/kota di Kalimantan selama lima tahun terakhir kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Apabila pertumbuhan PAD positif menandakan kecenderungan kinerja anggaran meningkat, dan sebaliknya apabila pertumbuhan PAD negatif menandakan kecenderungan kinerja menurun atau dengan kata lain terjadi penurunan kinerja PAD. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Indikator tersebut menunjukkan seberapa jauh

pembangunan telah berhasil mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sebagai nilai dari perubahan PDRB menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu. Peningkatan ini ditunjukkan dengan peningkatan alokasi pendapatan untuk konsumsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga masyarakat daerah tersebut menjadi lebih sehat, kaya, dan lebih berpendidikan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi tingkat pengangguran. Berdasar Tabel 1 tampak bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki rata-rata laju pertumbuhan untuk seluruh kabupaten/kota di Kalimantan per lima tahun sebesar 6,74%.

Pertumbuhan ekonomi terendah ditunjukkan di kabupaten Ketapang pada tahun 2014 yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2.86% dan pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2011 sebesar 19,29%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di kabupaten/kota Kalimantan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini terjadi karena harga komoditas global seperti permintaan batu bara dan minyak yang menurun cukup signifikan yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Kalimantan. Sumberdaya yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang mungkin menghambat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat Kalimantan adalah sumberdaya manusianya yang relatif rendah. Menurut Badrudin (2012), indikator kesejahteraan terkini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan di masing-masing kabupaten/kota. Apabila tujuan

pembangunan tercapai maka angka IPM meningkat. Berdasar Tabel 1 tampak variabel kesejahteraan masyarakat memiliki rata-rata untuk seluruh kabupaten/kota di Kalimantan per lima tahun sebesar 67,91. Kesejahteraan masyarakat terendah tersebut ditunjukkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2010 dan Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2014. Kesejahteraan masyarakat tertinggi di Kalimantan terdapat di Kabupaten Bontang pada tahun 2014 sebesar 78,58. Perkembangan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun.

Namun, perkembangan kesejahteraan masyarakat yang fluktuatif tersebut cenderung meningkat meskipun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena kekayaan atau tingkat kesejahteraan yang ada, belum mendorong meningkatnya IPM yang penilainnya mengacu pada kebutuhan dasar hidup masyarakat. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Berdasar pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Dalam konteks ini setiap daerah akan berbeda tingkat minimum pendapatannya, yang dipengaruhi tingkat kemahalan (harga) komoditas, baik berupa kelompok makanan dan kelompok bukan makanan. Variabel kemiskinan memiliki rata-rata untuk seluruh Kabupaten kota Kalimantan per lima tahun sebesar 7,34%. Rasio penduduk miskin terendah ditunjukkan di Kabupaten Banjar pada tahun 2013 sebesar 2,84% dan kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Malinau pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 15,31%. Terlihat bahwa perkembangan kemiskinan secara keseluruhan di Kalimantan mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun.

Setiap negara akan berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan perekonomian yang teguh.

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dengan memperhatikan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Tingkat pengangguran dapat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana semakin tinggi tingkat pengangguran suatu daerah maka semakin lesu tingkat pertumbuhannya. Hal ini disebabkan karena sebagian banyak orang yang menganggur maka akan menyebabkan beban pemerintah akan semakin bertambah. Tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota di Kalimantan berfluktuatif dari tahun ke tahun. Tingkat pengangguran tertinggi ditunjukkan oleh Kota Bontang sebesar 12,44%. Terjadi peningkatan dan penurunan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun. Analisis induktif dengan partial least square (PLS) pada penelitian ini terdiri atas penilaian outer model, Perhitungan nilai goodness of fit (inner model) serta pengujian hipotesis. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kemiskinan dan pengangguran kabupaten/ kota di Kalimantan meliputi variabel desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, dan pengangguran.

Di antara kelima variabel tersebut, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kemiskinan dan pengangguran merupakan variabel terukur, sedang variabel desentralisasi fiskal merupakan variabel laten. Sebagai variabel laten desentralisasi fiskal diukur dengan 4 indikator. Besarnya kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel laten dapat dilihat dari koefisien outer loading. Semakin tinggi koefisien outer loading dalam

angka mutlak mengindikasikan indikator tersebut semakin besar kontribusinya dalam menentukan variabel laten, sebaliknya semakin rendah koefisien outer loading dalam angka mutlak mengindikasikan indikator tersebut semakin kecil kontribusinya dalam menentukan variabel laten. Tanda positif (+) atau tanda negatif (-) pada koefisien outer loading menunjukkan arah kontribusi.

Hasil running data untuk outer loading ditunjukkan pada Tabel 2

Tabel 2  
*Outer factor* Desentralisasi fiskal

No.	Simbul	Indikator	Loading Factor
1	IP-1	Tingkat ketergantungan daerah	0,984
2	IP-2	Derajat desentralisasi fiskal	0,983
3	IP-3	Tingkat kemampuan pembiayaan daerah	0,956
4	IP-4	Laju pertumbuhan daerah	0,657

Sumber: Output (olah data)

Tanda positif (+) pada loading factor menunjukkan bahwa kontribusi indikator terhadap variabel desentralisasi bersamaan arah, artinya apabila indikator meningkat maka variabel desentralisasi fiskal juga meningkat.

Evaluasi goodness of fit model dilakukan terhadap Outer Model yang diukur dengan menggunakan convergent validity untuk uji validitas menunjukkan bahwa outer loading dalam angka mutlak, yaitu outer loading IP-1 (0,984), IP-2 (0,983), dan IP-3 (0,956) lebih besar daripada 0,70. Sedangkan outer loading IP-4 (0,657) lebih kecil daripada 0,7. Nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk variabel Desentralisasi Fiskal sebesar 0,820, variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 1, variabel kesejahteraan masyarakat sebesar 1, variabel kemiskinan sebesar 1 dan variabel pengangguran sebesar 1 yang semuanya lebih besar daripada 0,5. Ini berarti, model pengukuran untuk menguji validitas konstruk dalam rangka mengetahui kemampuan instrumen studi mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan convergent

validity dan Average Variance Extracted (AVE) adalah valid (Abdillah, 2009:61). Model struktural atau inner model pada kerangka konseptual yang dibangun berdasarkan referensi konsep dan teori fit apabila didukung oleh data empiris. Perhitungan nilai goodness of fit (inner model) didasarkan pada hasil analisis SEM WarpPLS pada Tabel 3.

Tabel 3  
**Hasil Inner Model (Nilai R-Square)**

Variabel	R- Square
Desentralisasi fiskal	-
Pertumbuhan ekonomi	0,004
Kesejahteraan masyarakat	0,228
Kemiskinan	0,030
Pengangguran	0,076

Sumber: Output PLS (olah data)

Goodness of fit inner model pada analisa PLS menggunakan ukuran Stone Geisser Q-Square test yang berupa nilai Q-Square Predictive Relevance dihitung berdasarkan nilai R2 masing-masing variabel endogen, yaitu variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai RPE 2 sebesar 0,004; variabel kesejahteraan masyarakat diperoleh nilai RKM 2 sebesar 0,228; Variabel kemiskinan diperoleh nilai RMK 2 sebesar 0,030; dan variabel pengangguran diperoleh nilai RPG 2 sebesar 0,076. Dengan demikian, nilai Q-Square predictive relevance sebesar:  $Q2 = 1 - (1 - RPE^2)(1 - RKM^2)(1 - RMK^2)(1 - RPG^2) = 1 - (1 - 0,004)(1 - 0,228)(1 - 0,030)(1 - 0,076) = 1 - (0,996)(0,772)(0,970)(0,924) = 1 - 0,69 = 0,31$  Berdasar penghitungan tersebut, diperoleh nilai Q-Square predictive relevance sebesar 0,31 atau 31%, sehingga model dikatakan memiliki nilai prediktif yang kuat karena variabel-variabel dalam model meliputi variabel desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kemiskinan mampu menjelaskan variabel pengangguran sebesar 31% sedangkan sisanya sebesar 69% merupakan variasi variabel lain di luar model.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal.

Variabel endogennya adalah kesejahteraan masyarakat, kemiskinan dan pengangguran, sedangkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel endogen intervening. Untuk lebih jelasnya hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Gambar 1. Berdasar Gambar 1 dapat diketahui bahwa tanda panah menunjukkan pengaruh antarvariabel (hipotesis), sedangkan simbol beta ( $\beta$ ) menunjukkan koefisien dan tingkat probabilitas ditandai dengan simbol P. Penjelasan dan interpretasi hasil pengujian masing-masing hipotesis statistik yang disajikan ditelaah secara berturut-turut.

## PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $\beta$  sebesar 0,06 dan nilai p-value sebesar 0,10 yang lebih besar dari nilai  $\alpha$  sebesar 5%. Oleh karena itu hipotesis pertama yang berbunyi desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Kalimantan tidak didukung.

Hasil studi ini tidak mendukung temuan empiris di antaranya Aschaur (1989), Barro (1990), Bahl dan Linh (1992), Bird (1993), Bird dan Wallich (1993), Oates (1993), Gramlich (1993), Prud'homme (1995), Peterson (1996), World Bank (1997b), Zang da Zou (1998), Bird dan Vaillancourt (2000), Martinez dan McNab (2001), serta penelitian di Indonesia seperti penelitian Wibowo (2008) dan Siamanjuntak (2010). Namun, berdasar pembahasan tinjauan pustaka dan kerangka teori sebelumnya, hasil studi ini mendukung temuan empiris di antaranya Phillips dan Woller (1997), Davodi dan Zao (1998), yang menyimpulkan dengan tegas bahwa terdapat pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah untuk kasus di negara-negara berkembang,

World Bank (1997) dalam argumentasi kedua menyebutkan bahwa terdapat hubungan negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, Zhang dan Zao (1998), yang menemukan bahwa semakin tinggi

derajat desentralisasi fiskal berdampak pada semakin rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah di China dalam 15 tahun terakhir; dan Zhang dan Zao (2001), hasil negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, serta penelitian di Indonesia oleh Swasono (dalam Simanjuntak, 2010), menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $\beta$  sebesar 0,32 dan nilai p-value sebesar ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat kabupaten/ kota di Kalimantan tahun 2010 sampai dengan 2014 semakin meningkat, dan sebaliknya.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006:22), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Berdasar pemikiran-pemikiran tentang model pengembangan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat maka pertumbuhan ekonomi berubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang diartikan sebagai pertumbuhan yang mendukung pencapaian pembangunan manusia yang tinggi. Korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tercermin dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan seluruh masyarakat secara lebih merata. Berdasar hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $\beta$  sebesar 0,07 dan nilai p-value sebesar 0,06 yang lebih besar dari nilai  $\alpha$  sebesar 5%.

Oleh karena itu, hipotesis kelima yang berbunyi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Kalimantan tidak didukung. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan memiliki hubungan positif. Artinya varian PDRB sebagai wujud pertumbuhan ekonomi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan absolut pada kabupaten/kota bersangkutan pada periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat eksklusif jadi hanya masyarakat tertentu yang menikmati pertumbuhan ekonomi. Sehingga masih banyak masyarakat yang pendapatannya rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang mengakibatkan tingkat kemiskinan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan hasil positif pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran ditunjukkan oleh Hamzah (2008). Wuku Astuti (2015) penelitian yang dilakukan menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efisiensi tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap pengangguran, namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Berdasar hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $\beta$  sebesar 0,28 dan nilai p-value sebesar masyarakat di kabupaten/kota Kalimantan.

Dengan kata lain bahwa tujuan akhir dari desentralisasi fiskal yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah terpenuhi; 3) desentralisasi fiskal berpengaruh

negatif signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/ kota Kalimantan. Oleh karena itu, pelaksanaan desentralisasi fiskal secara langsung dapat menekan jumlah penduduk miskin absolut secara signifikan di Kalimantan; 4) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Kalimantan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan laju pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kalimantan; 5) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Kalimantan. Hal ini disebabkan karena kemiskinan yang terjadi di kabupaten/kota Kalimantan yang menurun tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat eksklusif jadi hanya masyarakat tertentu yang menikmati pertumbuhan ekonomi. Sehingga masih banyak masyarakat yang pendapatannya rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang mengakibatkan tingkat kemiskinan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi; dan 6) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di kabupaten/kota Kalimantan. Hal ini disebabkan ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pengangguran akan meningkat. Kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang meningkat berasal dari sektor-sektor tersier yang tidak menimbulkan banyaknya kesempatan kerja. Saran Berdasar simpulan, terdapat keterbatasan dalam penelian ini, yaitu hasil penelitian belum mampu menjelaskan secara pasti mengapa pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Indikator pengangguran pada penelitian ini menggunakan data persentase tingkat pengangguran terbuka dan hasil yang ditunjukkan kurang mampu mencerminkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Ketika pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mampu mengurangi jumlah pengangguran dan tidak dapat diketahui penyebab pertumbuhannya, maka

dapat dianalisis melalui tingkat pengangguran per sektor. Berdasar telaah pelaksanaan desentralisasi fiskal, hasil penelitian, dan simpulan maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna bagi para pembuat kebijakan publik serta kepentingan praktis pelaksanaan desentralisasi fiskal dan penelitian selanjutnya, yaitu 1) untuk meningkatkan derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah, setiap kabupaten/kota harus memanfaatkan kewajiban local taxing power dengan cara mengembangkan aktivitas perekonomian yang berbasis keunggulan lokal; 2) pada penelitian selanjutnya diharapkan menambah indikator lain untuk mengukur pengangguran. Misalnya, menggunakan data penyerapan tenaga kerja pada masing-masing sektor, agar dapat mengetahui sektor mana yang mampu menyerap tenaga kerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akai, N. dan Sakata, M., 2002. *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross Section Data for the United States*, Journal of Urban Economics, LII:93-108.
- Bahl, Roy W. and Johanes Linh. 1992. *Urban Finance in Development Countries*. New York: Oxford University Press.
- Ginting, Ari Mulianta dan Rasbin. 2010. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Krisis", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 2 (1).
- Kälin, Walter. 2001. *Guide to decentralization*. Swiss agency for development and cooperation SDC.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Martinez-Vasquez, Jorge and Robert M. McNab. 2001. *Fiscal Decentralization and Economic Growth*. *International Studies Program Working Paper*. Atlanta: Andre Young School of Policy Studies
- Oates, Wallace E. 1993. "Fiscal Decentralization and Economic Development" *National Tax Journal*, Vol. 46 (3): 237-243.
- Sukirno, Sadono, 2000, *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Todaro, Michael P. and Smith Stephen C., 2003, *Economic Development*, Eighth Edition, United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Simanjuntak, Robert A. 2010. "Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi: Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia". *Prisma*, Vol. 29 (3): 35-57.
- Wibowo, Arif. 2005. *Pengantar Analisis Jalur*, Surabaya: LPPM Unair Surabaya. World Bank. 1990.
- World Development Report 1990: *Poverty*, Oxford University Press, Oxford. World Bank. 1993. *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*, Oxford: Oxford University Press.